



RENCANA KERJA
TAHUN 2022



PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA



ARSIP NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan hidayah yang telah diberikan, sehingga Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 dapat terselesaikan.

Renja ini menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebagai unit kerja untuk tahun 2022. Selain itu Renja ini disusun menyediakan rencana teknis 1 (satu) tahunan yang akan dijabarkan ke dalam Kerangka Acuan Kerja berbasis pada kinerja terukur guna memudahkan dalam penyusunan laporan kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

Dengan demikian, diharapkan bermanfaat bagi kita semua dengan harapan peran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebagai Perangkat Pemerintah Daerah yang menangani urusan Perpustakaan dan Kearsipan semakin kuat dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah yang tertuang dalam Renstra Periode Tahun 2021 – 2026.

Malili, Juni 2021

Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Kabupaten Luwu Timur



SATRIS E

Pangkat : Pembina Utama Muda
Nip 19641231 199010 1 005

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii
Daftar Tabel.....	iv
Daftar Gambar.....	v
Bab. I	Pendahuluan..... 1
1.1	Latar Belakang..... 1
1.2	Landasan Hukum..... 2
1.3	Maksud dan Tujuan..... 3
Bab. II	Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu..... 6
2.1	Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD..... 6
2.2	Analisa Kinerja Pelayanan SKPD 14
2.3	Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD17
2.4	Reviuw Terhadap Rancangan Awal RKPD 18
2.5	Penelaahan Usulan program dan Kegiatan Masyarakat ... 26
Bab. III	Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah 27
3.1	Telaahan terhadap Kebijakan Nasional 27
3.2	Tujuan dan Sasaran renja Perangkat Daerah 28
3.3	Program Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah 28
Bab. IV	Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah..... 35

Bab. V	Penutup.....	42
--------	--------------	----

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD	7
Tabel 2.2	Analisis Pencapaian Kinerja	15
Tabel 2.3	Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022	19
Tabel 3.1	Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023	29
Tabel 4.1	Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Tahun Anggaran 2022	37

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan mempunyai peran yang sangat strategis dalam pencapaian tujuan pembangunan suatu wilayah, yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Cakupan perencanaan pembangunan harus memperhatikan terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik dokumen perencanaan antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Luwu Timur merupakan dokumen perencanaan tahunan sebagai penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Luwu Timur Tahun 2021-2026, serta penyusunannya berpedoman pada RKPD Kab. Luwu Timur Tahun 2020 sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Luwu Timur.

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang No. 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, setiap Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang juga berisi rencana pembangunan tahunan daerah, mengatur tentang peranan dan tanggung jawab kepala SKPD untuk menyiapkan Rencana Kerja SKPD, keterkaitan visi dan misi Kepala Daerah Terpilih dengan RPJMD, Renstra SKPD dan RKPD, pokok-pokok isi dokumen Rencana Kerja SKPD, waktu pelaksanaan musrenbang daerah dan penyampaian RKPD. RKPD dijadikan pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja SKPD Undang-Undang ini menekankan keterkaitan erat antara penyusunan RKPD dengan Renja SKPD.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Dinas Perpustakaan dan Kearsipan menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022 yang berfungsi menerjemahkan, mengoperasionalkan RKPD kedalam program dan kegiatan SKPD sehingga berkontribusi kepada pencapaian tujuan dan capaian program RKPD secara keseluruhan dan tujuan strategis jangka menengah yang tercantum dalam renstra perubahan SKPD Tahun 2016-2021 merupakan dokumen perencanaan pembangunan bidang perpustakaan dan kearsipan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama

kurun waktu 1 tahun ke depan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada.

1.2. Landasan Hukum

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan adalah sebagai salah satu upaya mencerdaskan kehidupan Masyarakat khususnya di Kabupaten Luwu Timur sebagaimana yang diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebagai tujuan Nasional Bangsa Indonesia dan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan ditegaskan perlunya ditumbuhkan Budaya Gemar Baca melalui Pengembangan dan Pendayagunaan Perpustakaan sebagai sumber Informasi berupa Karya Cetak, Karya Tulis atau Karya Rekam, mewajibkan Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secara merata, menjamin kelangsungan pemeliharaan dan pengelolaan Perpustakaan sebagai pusat sumber belajar masyarakat, menggalakkan promosi Gemar Membaca dengan memanfaatkan Perpustakaan, memfasilitasi penyelenggaraan perpustakaan di daerah dan menyelenggarakan serta mengembangkan Perpustakaan Umum Daerah berdasarkan ke khasanah daerah sebagai pusat penelitian dan rujukan tentang kekayaan daerah.

Demikian pula arsip memiliki arti strategis dalam kegiatan suatu organisasi pemerintahan maka pengelolaan, pemeliharaan, pelestarian arsip dan dokumen vital serta penyelenggaraan kegiatan organisasi berfungsi sebagai akuntabilitas kinerja bukti hukum dan memori organisasi baik yang terekam dalam bentuk media kertas maupun audio visual perlu mendapat perhatian dan dukungan terutama kesiapan sarana dan prasarana serta Sumber Daya Manusia yang handal dan profesional sehingga arsip dan dokumen vital dapat dilestarikan secara tertib dan aman sebagai bukti Autentik dan Yuridis bila suatu saat dibutuhkan baik sebagai bahan penelitian maupun sebagai bukti yuridis.

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2021 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor); *(Menunggu dari Kemendagri)*
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

12. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 301) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 314);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 100);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 124);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 11);
16. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 69 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Luwu Timur (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 69);
17. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 48 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 – 2026 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 48);
18. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 Nomor). *(Menunggu Penetapan RKPD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023)*

1.3.Maksud dan tujuan

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Luwu Timur dimaksudkan untuk menjabarkan perencanaan, pembangunan, pengembangan pada bidang perpustakaan dan kearsipan selama satu tahun anggaran yaitu tahun anggaran 2022 yang dituangkan dalam program dan kegiatan OPD.

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan tahun 2022 adalah untuk mewujudkan keadaan yang diinginkan dalam kurun waktu satu tahun anggaran sesuai dengan visi, misi yang diaplikasikan melalui program kegiatan OPD dengan sasaran yang mengacu kepada Renstra OPD dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022.

Dalam rangka menjamin konsistensi antara Perencanaan dan Penganggaran maka Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 menjadi Pedoman untuk menyusun RKA Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

Rencana Kerja SKPD tahun 2022 disusun berdasarkan analisa kondisi objek permasalahan pengembangan perpustakaan dan kearsipan saat ini, Analisis kondisi objektif diharapkan dapat memberikan gambaran permasalahan yang masih dihadapi oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Gambaran permasalahan tersebut dimaksudkan untuk mendapatkan pemahaman besarnya tantangan yang dihadapi saat ini serta estimasi kondisi yang akan datang.

Dalam rangka penyusunan program dan kegiatan tahun 2022, maka evaluasi kinerja dilakukan dengan melihat realisasi 2 tahun terakhir yaitu tahun 2019- 2020 dan target capaian tahun perencanaan yaitu tahun 2021. Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan rencana kerja dimaksudkan agar dapat mengukur pencapaian Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Dengan demikian data dimaksud dapat dijadikan sebagai tolak ukur untuk penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun 2022.

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja OPD dan
Pencapaian Renstra OPD s/d Tahun 2020
Kabupaten Luwu Timur

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra OPD) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2020 (n-2)			Target Program dan Kegiatan 2021 (Renja OPD) Tahun n-1/
					Target Renja OPD tahun 2020	Realisasi Renja OPD 2020	Tingkat Realisasi (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9
2.17. 2.17.01. 7	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Jumlah pengunjung perpustakaan pertahun	12200	15562	8000	8169	100%	12000
		Jumlah koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	25586	34633	42000	34733	83%	24586
2.17. 2.17.01. 7 11	Penyediaan dan Pelestarian Bahan Pustaka Perpustakaan Daerah	Jumlah judul buku yang diadakan (judul)	673	1500	100	100	100%	796
		Jumlah buku yang dilestarikan (eksamplar)	200	0	200	200	100%	200
2.17. 2.17.01. 7 12	Pekan Masyarakat Membaca	Jumlah kegiatan pengembangan minat baca yang dilaksanakan (kegiatan)	3	4	1	1	100%	3

2.17.	2.17.01.	7	13	Layanan Pustaka dan Informasi/Layanan Sirkulasi	Jumlah kunjungan perpustakaan keliling (kali)	120	300	300	260	87%	200
					Jumlah kunjungan ke perpustakaan daerah (pengunjung)	12200	10000	8000	8169	100%	12000
2.17.	2.17.01.	7	14	Apresiasi Perpustakaan Desa dan Sekolah	Jumlah perpustakaan yang dinilai (perpustakaan)	22	22	22	22	100%	22
2.17.	2.17.01.	7	16	Pembinaan Pengelolaan Perpustakaan	Jumlah perpustakaan binaan perpustakaan	100	20	20	20	100%	20
2.18.	2.17.01.	20		Program Pembinaan Penyelenggaraan Kearsipan	persentase perangkat daerah yang tertib arsip dinamis	100					
2.18.	2.17.01.	20	1	Peningkatan Kapasitas Pengelola Arsip Daerah	Jumlah pengelola kearsipan yang dikapasitasi	100	49	45	45	100%	85
2.18.	2.17.01.	20	2	Pembinaan Kearsipan Perangkat Daerah & Desa	Jumlah perangkat daerah yang dibina kearsipannya	45	35	25	25	100%	35
2.18.	2.17.01.	20	4	Pengawasan Internal Kearsipan	Jumlah SKPD dan desa yang diawasi kearsipannya	54	38	30	30	100%	38
2.18.	2.17.01.	21		Program Peningkatan Sistem Informasi Kearsipan Daerah	Persentase dokumen arsip yang terdata dan tertata secara akurat						
2.18.	2.17.01.	21	1	Pengelolaan Database Kearsipan	Jumlah data arsip yang dikelola	6500	6000	6000	8812	100%	6000
2.18.	2.17.01.	21	2	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi Kearsipan	Jumlah aplikasi yang dikembangkan	0	1	0	0	0	0

2.18.	2.17.01.	21	3	Penyediaan Layanan Informasi Kearsipan	Jumlah arsip yang dialihmediakan	0	20	20	20	100%	0
2.17	2.17.01.	1		Program pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase capaian pelayanan administrasi perkantoran yang terpenuhi						
2.17	2.17.01.	1	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar (surat)	600	693	500	382	76,4%	500
2.17	2.17.01.	1	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening air dan listrik yang terbayar (rekening)	180	36	36	36	100%	36
2.17	2.17.01.	1	3	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah jasa kebersihan yang terbayar (orang)	8	2	2	2	100%	2
2.17	2.17.01.	1	4	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah peralatan kerja yg diperbaiki (unit)	181	48	39	39	100%	38
2.17	2.17.01.	1	5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (jenis)	78	39	39	39	100%	39
2.17	2.17.01.	1	6	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan (jenis)	8	10	10	10	100%	8
2.17	2.17.01.	1	7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen listrik yg tersedia (jenis)	6	6	6	6	100%	6
2.17	2.17.01.	1	8	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan (kotak)	850	750	1680	1680	100%	850
2.17	2.17.01.	1	9	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan yang tersedia (eksamplar)	60	60	60	60	100%	60

2.17	2.17.01.	1	10	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah rakor dan konsultasi yang dilakukan (kali)	191	70	41	79	193%	191
2.17	2.17.01.	1	11	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi /teknis	Jumlah tenaga upah jasa yang dibayarkan (orang)	6	11	11	11	100%	6
2.17	2.17.01.	1	12	Monitoring dan evaluasi	Jumlah laporan hasil monitoring, dan evaluasi (dokumen)	0	4	4	4	100%	4
2.17	2.17.01.	1	13	Kunjungan kerja dalam daerah	Jumlah kunjungan dalam daerah yang dilakukan (kali)	0	300	289	219	76%	196
2.17	2.17.01.	1	14	Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Kegiatan SKPD	Jumlah hari kegiatan pameran yang dilakukan (hari)	0	10	0	0	0	0
2.17	2.17.01.	2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase capaian peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang terpenuhi						
2.17	2.17.01.	2	3	Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan (unit)	279	1	1	1	100%	9
2.17	2.17.01.	2	5	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Gedung kantor yang terpelihara (unit)	2	2	2	2	100%	2
2.17	2.17.01.	2	6	Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan dinas operasional	Jumlah kendaraan dinas operasional kantor yang terpelihara (unit)	6	4	5	5	100%	6
2.17	2.17.01.	4		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah aparatur yang ditingkatkan kapasitasnya						

2.17	2.17.01.	5		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase penyelesaian laporan kinerja dan keuangan yang disusun tepat waktu	B						
2.17	2.17.01.	5	1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan kinerja dan keuangan yang disusun (dokumen)	0	2	2	2	100%	0	
2.17	2.17.01.	5	2	Penyusunan pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Jumlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang disusun (dok)	0	1	1	1	100%	1	
2.17	2.17.01.	6		Program Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yang disusun							
2.17	2.17.01.	6	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Jumlah dokumen perencanaan SKPD yang disusun	3	7	7	7	100%	2	

Pada evaluasi tersebut diatas, dapat dijabarkan program kegiatan yang memiliki tingkat capaian yang sesuai dengan target perencanaan dan yang kurang dari target begitu juga dengan yang melebihi target kinerja, sebagaimana penjelasan berikut :

❖ Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Pada tabel 2.1 di atas, dapat dilihat beberapa kegiatan yang pada tahun 2020 tidak tercantum target dan realisasi karena refofusing anggaran terkait Pandemi Covid-19, kegiatan dimaksud, antara lain:

A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1. Penyediaan Jasa Surat menyurat

Realisasi capaian kinerja tahun 2020 tidak memenuhi target karena Covid 19 sehingga surat masuk dan keluar tidak memenuhi target yang telah ditetapkan. Target 500 surat masuk dan keluar hanya terealisasi 382 Surat.

Capaian renstra sampai dengan tahun 2020 dapat terealisasi sebesar 76,4% dari target kinerja renstra 500 surat dengan perkiraan sebanyak 500 pada tahun 2021.

Untuk kegiatan ini akan tetap menyediakan 500 surat masuk dan keluar untuk tahun 2021.

2. Kunjungan kerja dalam daerah

Realisasi capaian kinerja tahun 2020 tidak memenuhi target karena kurangnya kunjungan dalam daerah karena Covid-19.

Capaian renstra sampai dengan tahun 2020 dapat terealisasi sebesar 76 % dari target kinerja renstra 289 kali dengan perkiraan realisasi 289 dari tahun tersebut, kinerja tahun 2016 sampai 2020 ditambah dengan target kinerja direncanakan untuk tahun 2021

3. Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Kegiatan SKPD

Pada kegiatan ini tidak terlaksana karena refofusing anggaran.

B. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1. Pembangunan Gedung Kantor

Pada kegiatan ini tidak terlaksana karena refofusing anggaran, namun dianggarkan kembali pada tahun 2021.

C. Program Peningkatan Sistem Informasi Kearsipan

Pada kegiatan ini tidak terlaksana karena refofusing anggaran.

❖ Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

1. Pekan Masyarakat Membaca
2. Apresiasi Perpustakaan Desa dan Sekolah
3. Penyediaan dan Pelestarian Bahan Pustaka Perpustakaan Daerah
4. Layanan Pustaka dan Informasi/Layanan Sirkulasi
5. Peningkatan Kapasitas Pengelola Arsip Daerah
6. Pembinaan Kearsipan Perangkat Daerah dan Desa
7. Pengawasan internal kearsipan
8. Pengelolaan Data Base Kearsipan
9. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
10. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
11. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
12. Penyediaan Alat Tulis Kantor
13. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
14. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
15. Penyediaan Makanan dan Minuman
16. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
17. Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/teknis
18. Monitoring dan evaluasi
19. Kunjungan Kerja dalam Daerah
20. Pengadaan perlengkapan Gedung Kantor

21. Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor
22. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
23. Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan dinas operasional
24. Penyusunan pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
25. Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran SKPD

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Luwu Timur sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya terus berupaya untuk memberikan kinerja pelayanan kepada masyarakat, aparatur, pihak-pihak lainnya yang memerlukan pelayanan perpustakaan maupun pelayanan kearsipan.

Tolak ukur Kinerja yang dapat diterapkan dalam penetapan Indikator Kinerja adalah berdasarkan Indikator Kinerja Utama sebagai berikut:

1. Persentase peningkatan kunjungan pemustaka yang memanfaatkan perpustakaan
2. Persentase arsip statis yang telah dibuatkan saran temu balik
3. Persentase capaian kinerja program perangkat daerah (%)

Indikator kinerja pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebagai pengukur kinerja pelayanan dengan analisis target, capaian dan proyeksi tahun 2021 s/d tahun 2026, sebagai tabel berikut :

Table 2.2
ANALISIS PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN

NO	INDIKATOR	SPM/STANDAR NASIONAL	IKK/ (PP-6/08)	Target Renstra SKPD					REALISASI CAPAIAN			PROYEKSI CAPAIAN		Catatan Analisis
				Tahun 2021 (n-3)	Tahun 2022 (n-2)	Tahun 2023 (n-1)	Tahun 2024 (n)	Tahun 2025 (n+1)	Tahun 2021 (n-3)	Tahun 2022 (n-2)	Tahun 2023 (n-1)	Tahun 2024 (n)	Tahun 2025 (n+1)	
1	2	3	4	5	6	7			8	9	10	11		14
1	Jumlah perpustakaan			336	336	336	336	336	337	337	338	338	338	Berdasarkan standar nasional perpustakaan, khusus perpustakaan kabupaten/ kota untuk kunjungan fisik per kapita per tahun sekurang-kurangnya 55 % dengan perhitungan jumlah kunjungan/ jumlah penduduk. Hal ini menuntut peningkatan minat baca masyarakat yaitu dengan mendekati masyarakat dengan perpustakaan. Dengan demikian, melalui kegiatan pembinaan, dapat memotivasi desa untuk mengaktifkan perpustakaan di desa. Target yang ditetapkan tersebut berdasarkan dari data jumlah penduduk yang mana mengalami peningkatan tiap tahunnya.
2	Jumlah pengunjung perpustakaan pertahun			12000	12200	12500	15000	16000	12010	12205	12510	15010	16010	Target yang diberikan belum dapat memenuhi standar disebabkan perhatian masyarakat yang saat ini tertuju pada internet, media sosial dan gadget sehingga mengurangi minat baca khususnya terhadap buku. Namun untuk mendorong peningkatan minat baca masyarakat, diharapkan dapat didukung dengan kegiatan lomba-lomba minat baca yang diselenggarakan di perpustakaan daerah dan juga dengan diaktifkannya perpustakaan keliling di tempat-tempat keramaian atau fasilitas umum.
3	Jumlah Arsip aktif dan in aktif yang telah dibuatkan daftar arsip			50	75	100	125	150	50	75	100	125	150	Pengelolaan dan penataan arsip dengan baik agar mudah diakses dan dipergunakan oleh yang berhak menggunakannya. Menata arsip yang baik bukan sekedar membuat daftar arsip guna penemuan kembali arsip, tetapi juga mengolah arsip menjadi informasi yang mencerminkan keberadaan, tugas dan fungsi pencipta arsip.
4	Nilai Akip			60	62	64	70	72	61	62	64	70	72	

a. Pelayanan Perpustakaan

Perpustakaan merupakan salah satu sumber belajar dalam rangka mencerdaskan dan memasyarakatkan minat dan budaya baca masyarakat, anak didik dilingkungan sekolah. Untuk Perpustakaan bisa berjalan secara optimal dilaksanakan melalui pelayanan, baik pelayanan publik maupun melalui pembinaan. Urusan perpustakaan dalam menyelenggarakan pembangunan menyelenggarakan satu Program yaitu Program Pembinaan Perpustakaan dengan 2 kegiatan dan 10 sub kegiatan. Salah satu sub kegiatan yang bisa mensupport Visi Misi Kepala Daerah adalah pengelolaan dan pengembangan Bahan Pustaka Perpustakaan Daerah dengan pengadaan buku-buku yang identic dengan kegiatan prioritas yang didukung dari dana APBD Kabupaten Luwu Timur.

b. Pelayanan Kearsipan

Penyelenggaraan layanan Kearsipan merupakan layanan wajib yang harus diselenggarakan oleh pemerintah daerah untuk mengamankan arsip-arsip milik daerah baik dalam bentuk naskah naskah maupun dalam bentuk lainnya dalam keadaan tunggal maupun kelompok.

Dalam upaya peningkatan pelayanan kearsipan yang berkesinambungan dari tingkat bawah sampai tingkat atas dikeluarkanlah Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor : 14 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Pemerintah Desa/Kelurahan disamping Permendagri No. 30 Tahun 1979 tentang Tata Kearsipan Pemerintah Dalam Negeri, Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 64 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Kearsipan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 4 Tahun 2013.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Luwu Timur mengidentifikasi isu-isu penting terkait penyelenggaran tugas dan fungsinya. Dan dari hasil identifikasi tersebut diharapkan mampu menjadi tujuan dan sasaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dalam meningkatkan kinerja dengan tepat dalam mengambil kebijakan.

Dengan seiring waktu, isu strategis dapat berubah. Dan dalam tahun rencana 2022 dapat diidentifikasi isu-isu sebagai berikut :

1. ISU INTERNAL

a. Keterbatasan Sumber Daya Manusia

Berdasarkan Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional RI Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Standar Nasional Perpustakaan Kabupaten/Kota menyebutkan bahwa jumlah tenaga perpustakaan yang memiliki kualifikasi di bidang perpustakaan sekurang-kurangnya 1 (satu) orang per 25000 penduduk kab/kota dan jumlah tenaga perpustakaan (pustakawan) yang berkualifikasi di bidang perpustakaan dan informasi paling sedikit 1 (satu) orang per 75000 penduduk. Berdasarkan Setelah evaluasi capaian kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan mendapatkan capaian sebesar 111 %, namun sejauh ini hambatan yang paling kritis dialami adalah keterbatasan tenaga SDM,

1. Dalam pelaksanaan meningkatkan minat baca masyarakat, hambatan utama yang dihadapi adalah keberadaan internet dan media sosial yang sangat dekat keberadaannya dengan individu masyarakat dan sangat mudah untuk diakses dengan penggunaan gadget, smartphone, dan peralatan sejenisnya. Sedangkan untuk mewujudkan perangkat daerah dan desa yang tertib kearsipannya, terkendala dengan sarana dan prasarana khususnya di desa dan kurangnya perhatian dan pemahaman pengelola arsip pada perangkat daerah.
2. Pada visi dan misi kepala daerah, urusan perpustakaan dan kearsipan mendukung misi “Mendorong Reformasi Birokrasi untuk Tata Kelola Pemerintahan yang Baik”. Dan untuk mewujudkan administrasi yang tertib, maka setiap perangkat daerah harus melaksanakan perbaikan sistem kearsipannya masing-masing sesuai sasaran pertama yaitu “meningkatnya perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik”. Dan dengan memaksimalkan kualitas pelayanan perpustakaan, yang menunjang sasaran yang kedua yaitu “Meningkatkan kinerja pelayanan publik”.
3. Tantangan yang dihadapi adalah
 - Paradigma “*paperless*” membuat lapisan masyarakat cenderung memilih dan mengandalkan system elektronik. Begitu juga dengan kebutuhan informasi dan hiburan sehingga masyarakat yang kurang meminati buku.

- Merubah pola pikir penanggung jawab kearsipan untuk lebih menyenangi keteraturan dokumen arsip.

a. Ekstern

1. Masih rendahnya minat baca masyarakat;
2. Terbatasnya koleksi bahan pustaka;
3. Masih rendahnya kemampuan / penguasaan IT baik perpustakaan maupun kearsipan khususnya bagi petugas pengelola arsip/arsiparis maupun pustakawan;
4. Belum optimalnya pelayanan informasi kearsipan;
5. Adanya SKPD yang belum melaksanakan pengelolaan arsip secara baku sesuai klasifikasi arsip;
6. Kurangnya pemahaman masalah kearsipan (arsip masih dipandang sebelah mata).

b. Hambatan

1. Penempatan pustakawan, arsiparis / petugas pengelola arsip tidak sesuai tugas dan fungsi pokoknya;
2. Kurangnya pemahaman masalah kearsipan (arsip masih dipandang sebelah mata);
3. Pelayanan perpustakaan terutama perpustakaan keliling belum optimal karena rendahnya minat dan budaya masyarakat;
4. Jumlah pustakawan dan arsiparis terbatas sehingga pembinaan ke desa belum optimal.

2.4. Reviuw Terhadap Rancangan Awal RKPD

Bahwa dalam proses penyusunan rancangan awal RKPD, hasil identifikasi permasalahan menjadi konsep rumusan program dan kegiatan. Program dan kegiatan tersebut dengan menganalisa kebutuhan SKPD kemudian dipilah antara program dan kegiatan yang sifatnya wajib, prioritas dan rutin.

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dalam menyusun rancangan awal RKPD sudah sesuai dengan Permendagri No 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah bahkan dalam proses rancangan awal RKPD ada beberapa program yang belum dilaksanakan karena belum menjadi kebutuhan dan kondisi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Tabel 2.3. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
Tahun 2022

RUMUSAN RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN TAHUN 2022
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2023(Rancangan Awal)
KABUPATEN LUWU TIMUR

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub.Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2022 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 (N+1)	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					APBD			
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN					APBD			
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase Rata-rata kinerja pelayanan administrasi perkantoran terpenuhi	100%	2.287.813.200.336	APBD			
	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Luwu Timur	Prosentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat yang disusun tepat waktu	100%	79.892.807	APBD			

					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	SKPD	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu	2 dokumen	34.614.480	APBD			
					Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA SKPD	SKPD	Jumlah dokumen RKA SKPD yang disusun tepat waktu	2 dokumen	5.000.000	APBD			
					Koordinasi dan penyusunan dokumen DPA SKPD	SKPD	Jumlah dokumen DPA SKPD yang disusun tepat waktu	2 dokumen	5.497.600	APBD			
					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Luwu Timur	Jumlah laporan kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu	10 dokumen	34.780.727	APBD			
					Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah	SKPD	Prosentase rata-rata capaian kinerja adminsitras keuangan peranglat daerah	100%	2.286.351.851.890	APBD			
					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	SKPD	Jumlah ASN yang gaji dan tunjangannya terbayarkan	25 Orang	2.286.351.851.890	APBD			

						perkantoran terpenuhi						
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan dinas jabatan	SKPD	Jumlah Kendaraan Perorangan dinas atau kendaraan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	6 Unit	61.450.000	APBD	
						Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	SKPD	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	33 Unit	20.360.000	APBD	
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya	SKPD	Jumlah bangunan gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi (unit)	3 unit	30.000.000	APBD	
						PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Kab. Luwu Timur	Persentase peningkatan jumlah orang yang mengakses perpustakaan	100%	567.211.148	APBD	
						Pengelola Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Kab.Luwu Timur	Persentase peningkatan jumlah orang yang mengakses perpustakaan	100%	382.131.771	APBD	
						Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/ kota sesuai dengan standar Nasional Perpustakaan	Kab.Luwu Timur	Jumlah Perpustakaan sekolah yang dibina	20 Perpustakaan	30.000.000	APBD	
						Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/ Kota	Kab.Luwu Timur,	Jumlah Hari Kegiatan pameran dilakukan, Jumlah Kunjungan Perpustakaan, Jumlah Pengunjung Perpustakaan	5 Hari, 120 Kali, 120000 Pengunjung	207.131.771	APBD	

					Pengelolaan dan pengembangan Bahan Pustaka	SKPD	Jumlah Buku yang dilestarikan, jumlah koleksi yang diadakan	200 Eksamplar, 500 Judul	145.000.000	APBD			
					Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Kab.Luwu Timur	Persentase Peningkatan Jumlah Orang Yang Mengakses Perpustakaan	100%	185.079.377	APBD			
					Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-tempat Umum yang menjadi Kewenangan daerah Kabupaten/kota	Malili	Jumlah Bangunan sarana Perpustakaan yang diadakan	unit	0	APBD			
					Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya gemar Membaca	Kab.Luwu Timur	Jumlah Kegiatan Pembangan Minat Bacayang dilaksanakan, jumlah perpustakaan yang dinilai	4 Lomba, 22 Perpustakaan	167.317.577	APBD			
					Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Kab. Luwu Timur	Jumlah Perpustakaan Binaan yang berbasis inklusi sosial	10 Perpustakaan	17.761.800	APBD			
					URUSAN PEMERINTAH BIDANG KEASRIPAN								
					PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP		Persentase perangkat daerah dan desa yang tertib arsip dinamis dan arsi statis	100%	317.604.453	APBD			
					Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/ Kota	Kab.Luwu Timur	Persentase perangkat daerah dan desa yang tertib arsip dinamis	100%	55.000.000	APBD			

				Penciptaan dan penggunaan arsip dinamis	Kab.Luwu Timur	Jumlah Dokumen Arsip yang Dikelola	6000 Dokumen	55.000.000	APBD			
				Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Luwu Timur	Persentase perangkat daerah dan desa yang tertib arsip statis	100%	25.000.000	APBD			
				Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Kab.Luwu Timur	Jumlah dokumen Perangkat Daerah yang diakuisisi	2000 Dokumen	25.000.000	APBD			
				Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/ Kota	Kab.Luwu Timur	Persentase perangkat daerah dan desa yang tertib arsip dinamis	100%	237.604.453	APBD			
				Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah kabupaten/ Kotaa	Kab.Luwu Timur	Jumlah OPD dan Desa yang diawasi Kearsipannya, Jumlah Pengelola arsip yang dikapabilitas, jumlah perangkat daerah yang dibina kearsipannya	38 (OPD dan Desa), 85 Pengelola, 35 (OPD dan Desa)	237.604.453	APBD			
				PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP		Persentase dokumen/ arsip yang terdata dan tertata secara akurat	100%	36.787.006	APBD			
				Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/ kota Yang memiliki Retensi di bawah 10 (sepuluh) Tahun	SKPD	Persentase dokumen/ arsip yang terdata dan tertata secara akurat	100%	36.787.006	APBD			
				Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh)Tahun	SKPD	Jumlah arsip usul musnah	2000 Dokumen	36.787.006	APBD			
				TOTAL				2.288.734.802.943				

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan menyusun program dan kegiatan berdasarkan sasaran dan tujuan perangkat daerah yang akan dicapai sebagaimana yang termuat dalam dokumen Rencana strategis dimana urusan perpustakaan dan urusan kearsipan dalam mendukung visi kepala daerah *“Luwu Timur Yang Berkelanjutan Dan Lebih Maju Berlandas Nilai Agama dan Budaya”*. berada pada misi *“Meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat secara menyeluruh”*.

Sekaitan dengan pelayanan, usulan dari masyarakat juga dapat menjadi bahan evaluasi dalam menyusun perencanaan program dan kegiatan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yang difasilitasi melalui Musyawarah Rencana Pembangunan dan pokok pikiran dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selama kegiatan yang diusulkan berkaitan dengan pengembangan budaya dan minat baca masyarakat dan pengelolaan administrasi arsip daerah.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, bahwa dari salah satu ketujuh agenda pembangunan nasional adalah revolusi mental dan pembangunan kebudayaan yang bertujuan untuk membangun manusia Indonesia yang memiliki cara pikir yang terbuka, kritis, kreatif, dan memiliki karakter. Upaya membangun kualitas manusia budaya literasi perlu dijadikan menjadi fondasi yang kokoh bagi terwujudnya masyarakat berkualitas dan sejahtera.

kebijakan nasional yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yaitu Peningkatan Kapasitas Birokrasi melalui Reformasi Birokrasi yang ditindaklanjuti dengan kebijakan renjana kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dengan Pelaksanaan Penerapan e-Arsip di tiap Unit Organisasi Pemerintah dan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang berkualitas, serta dalam upaya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yaitu dengan Pengembangan Sistem Layanan Perpustakaan yang Berbasis Teknologi Informasi.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Pada Renja tahun 2021, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan akan mengangkat pelayanan Perpustakaan Digital karena di era digital saat ini orang-orang lebih dekat dengan gadget dari pada buku sehingga dengan Perpustakaan Digital ini mampu menempatkan buku yang ada pada perpustakaan di Internet/Gadget dan Perpustakaan Umum yang didukung dengan sarana dan prasarana yang menyenangkan bagi pemustaka.

Untuk bidang kearsipan, pengelolaan database arsip yang masih dilakukan secara manual akan dikelola dengan Sistem Informasi Kearsipan Daerah yang dapat diintegrasikan dengan unit kearsipan di setiap perangkat daerah. Hal ini dimaksudkan agar penataan, pengelolaan, dan pengklasifikasian arsip sesuai dengan standar baku kearsipan dan pengelolaannya dapat dipantau melalui SIKD.

Dan berdasarkan hasil evaluasi kinerja oleh inspektorat yang masih menemukan adanya in konsistensi indikator kinerja dalam setiap laporan kinerja, maka kesekretariatan sebagai

pendukung layanan umum yang melakukan monitoring dan evaluasi kinerja perangkat daerah memastikan target kinerja terealisasi dan melaporkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang berkualitas.

Berdasarkan isu-isu penting tersebut di atas, maka dirumuskan tujuan dan sasaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebagai berikut :

Tujuan

1. Mewujudkan perpustakaan sebagai destinasi wisata baca
2. Mewujudkan penyelenggaraan Sistem Informasi Kearsipan Daerah
3. Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan layanan urusan perangkat daerah

Sasaran

1. Meningkatnya literasi masyarakat
2. Meningkatnya arsip statis yang telah dibuatkan saran bantu temu balik
3. Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan perangkat daerah

3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan rumusan program dan kegiatan yang disusun pada Renja tahun 2020 adalah tugas pokok dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dalam melakukan pelayanan, pengembangan, dan menyelenggarakan perpustakaan dan pembinaan tata laksana kearsipan untuk mendukung visi kepala daerah pada misi mendorong reformasi birokrasi untuk tata kelola pemerintahan yang baik.

Dalam Rencana Kerja Tahun 2022 terdapat 5 (Lima) program, 15 kegiatan dan 42 Sub Kegiatan untuk beberapa kelompok sasaran yaitu Lingkup Dinas DPK, masyarakat umum, pelajar, komunitas literasi, dan unit kearsipan perangkat daerah dan desa.

Tabel 3.1
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Luwu Timur
Tahun 2022

Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.01.00 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Unit Sub Organisasi : 2.23.2.24.0.00.01.00 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023								
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)					
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target						
2																			
					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
2	23										4,204,432,065							4,884,996,644	
2	23	01									3,751,795,332							4,188,607,875	
2	23	01	2.01								84,857,219							85,555,927	
2	23	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu	Persentase Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang dimanfaatkan		100 %	2 dokumen	100 %	33,960,755				Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	37,110,000
2	23	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah dokumen RKA SKPD yang disusun tepat waktu	Persentase Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang dimanfaatkan		100 %	2 Dokumen	100 %	5,948,137				Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	5,497,600
2	23	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah dokumen DPA SKPD yang disusun tepat waktu	Persentase Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang dimanfaatkan	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 Dokumen	100 %	7,497,600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	5,497,600
2	23	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah laporan kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu	Persentase Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang dimanfaatkan		100 %	10 Dokumen	100 %	37,450,727				Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	37,450,727
2	23	01	2.02									2,551,090,448						2,786,470,448	
2	23	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah ASN yang gaji dan tunjangannya terbayarkan	Persentase administrasi keuangan perangkat daerah yang terbayarkan	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	25 Orang	100 %	2,515,010,448	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	2,750,390,448
2	23	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semes teran SKPD	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD yang disusun tepat waktu	Persentase administrasi keuangan perangkat daerah yang terbayarkan		100 %	18 dokumen	100 %	36,080,000				Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	36,080,000

2	23	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								16,400,000						20,000,000
2	23	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah dokumen laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD yang disusun	Jumlah dokumen BMD yang teradministrasikan	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	4 Dokumen	4 Dokumen	16,400,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	20,000,000	
2	23	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								75,240,000						113,400,000
2	23	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya yang diadakan (stel)	Persentase Administrasi kepegawaian perangkat daerah yang terrealisasi		100 %	44 stel	100 %	30,000,000			Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	32,750,000	
2	23	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan (Orang)	Persentase Administrasi kepegawaian perangkat daerah yang terrealisasi		100 %		100 %	45,240,000			Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	80,650,000	
2	23	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang di sediakan (jenis)	Persentase administrasi umum perangkat daerah yang terlaksana		100 %	6 jenis	100 %	7,790,000			Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	7,790,000	
2	23	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan (jenis)	Persentase administrasi umum perangkat daerah yang terlaksana		100 %	14 Jenis	100 %	9,579,500			Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	9,579,500	
2	23	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Barang cetakan dan/atau penggandaan yang disediakan (jenis)	Persentase administrasi umum perangkat daerah yang terlaksana		100 %	8 jenis	100 %	7,900,300			Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	8,000,000	
2	23	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan (eksamplar)	Persentase administrasi umum perangkat daerah yang terlaksana		100 %	60 eksamplar	100 %	6,120,000			Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	6,120,000	
2	23	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah tamu yang difasilitasi (Orang)	Persentase administrasi umum perangkat daerah yang terlaksana		100 %	850 orang	100 %	28,500,000			Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	34,250,000	
2	23	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diikuti (kali)	Persentase administrasi umum perangkat daerah yang terlaksana		100 %	191 Kali	100 %	179,042,000			Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	229,942,000	
2	23	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								392,064,000						479,000,000
2	23	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah mebel yang diadakan	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintah yang terealisasi	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	87 Unit	100 %	109,364,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	150,000,000	

2	23	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan (Unit)	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintah yang terealisasi		100 %	22 Unit	100 %	34,900,000			Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	50,000,000
2	23	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintah yang terealisasi	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Unit	100 %	85,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	100,000,000
2	23	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintah yang terealisasi		100 %	21 Unit	100 %	162,800,000			Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	179,000,000
2	23	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							289,951,865					377,000,000	
2	23	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah surat masuk dan keluar yang diadministrasikan (Surat)	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan perangkat daerah yang terealisasi		100 %	600 Surat	100 %	6,951,865			Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	10,000,000
2	23	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah rekening telepon, listrik dan air yang terbayarkan (Rekening)	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan perangkat daerah yang terealisasi		100 %	60 rekening	100 %	160,000,000			Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	160,000,000
2	23	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah jasa tenaga pelayanan umum kantor yang disediakan	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan perangkat daerah yang terealisasi	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	8 Orang	100 %	123,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	207,000,000
2	23	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							103,260,000					31,500,000	
2	23	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau jabatan yang dipelihara (unit)	Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah secara rutin		100 %	(unit)	100 %	61,450,000			Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	0
2	23	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara (Unit)	Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah secara rutin		100 %	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara (Unit)	100 %	20,360,000			Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	0
2	23	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah gedung kantor dan/atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi (Unit)	Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah secara rutin		100 %	Jumlah gedung kantor dan/atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi (Unit)	100 %	21,450,000			Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	31,500,000
2	23	02			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN							452,636,733					696,388,771	
2	23	02	2.01		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							227,843,686					465,388,771	
2	23	02	2.01	01	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Indeks pembangunan literasi masyarakat	Jenis layanan perpustakaan elektronik (Jenis)	Persentase pengelolaan perpustakaan tingkat kabupaten/kota yang terealisasi sesuai rencana		0.05 Indeks		100 %	10,000,000			Indeks pembangunan literasi masyarakat	0.05 Indeks	30,000,000

2	23	02	2.01	04	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Indeks pembangunan literasi masyarakat	Jumlah pengelola Perpustakaan sekolah yang dibina (Pengelola)	Persentase pengelolaan perpustakaan tingkat kabupaten/kota yang terealisasi sesuai rencana		0.05 Indeks	20 perpustakaan	100 %	16,963,780			Indeks pembangunan literasi masyarakat	0.05 Indeks	63,635,000	
2	23	02	2.01	07	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	Indeks pembangunan literasi masyarakat	Jumlah kunjungan perpustakaan (Kali) Jumlah pengunjung ke perpustakaan (orang) Jumlah hari kegiatan pameran (hari)	Persentase pengelolaan perpustakaan tingkat kabupaten/kota yang terealisasi sesuai rencana	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0.05 Indeks	120 Kali ,12200 Orang, 5 hari	100 %	170,879,931	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Indeks pembangunan literasi masyarakat	0.05 Indeks	220,781,771	
2	23	02	2.01	09	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Indeks pembangunan literasi masyarakat	Jumlah buku yang diadakan Jumlah buku yang diestorikan	Persentase pengelolaan perpustakaan tingkat kabupaten/kota yang terealisasi sesuai rencana		0.05 Indeks	50 Judul 200 eksampul	100 %	14,999,975			Indeks pembangunan literasi masyarakat	0.05 Indeks	120,972,000	
2	23	02	2.01	10	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Indeks pembangunan literasi masyarakat	terselenggaranya pendataan tenaga pengelola perpustakaan (orang)	Persentase pengelolaan perpustakaan tingkat kabupaten/kota yang terealisasi sesuai rencana		0.05 Indeks	2 Orang	100 %	15,000,000			Indeks pembangunan literasi masyarakat	0.05 Indeks	30,000,000	
2	23	02	2.02		Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								224,793,047						231,000,000
2	23	02	2.02	01	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Indeks pembangunan literasi masyarakat	Jumlah Peserta dalam sosialisasi budaya baca dan literasi	Persentase pembudayaan gemar membaca tingkat daerah kabupaten/kota yang terealisasi	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0.05 Indeks	200 Orang	100 %	50,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase peningkatan jumlah orang mengakses perpustakaan yang responsive gender	0.05 Indeks	20,000,000	
2	23	02	2.02	03	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Indeks pembangunan literasi masyarakat	Jumlah lomba minat baca yang dilaksanakan Jumlah perpustakaan yang dinilai	Persentase pembudayaan gemar membaca tingkat daerah kabupaten/kota yang terealisasi		0.05 Indeks	3 Lomba 22 perpustakaan	100 %	135,081,247			Persentase peningkatan jumlah orang mengakses perpustakaan yang responsive gender	0.05 Indeks	168,000,000	
2	24				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN							325,797,485							415,137,006
2	24	02			PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP							263,275,479							350,350,000
2	24	02	2.01		Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota							80,311,026							95,500,000

2	24	02	2.01	01	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Persentase tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja	Jumlah dokumen arsip yang dikelola (dokumen)	Persentase pengelolaan arsip dinamis daerah kabupaten/kota yang terealisasi		100 %		100 %	47,626,026			Persentase tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja	100 %	60,000,000
2	24	02	2.01	03	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja	Jumlah OPD dan Desa yang diawasi kearsipannya (OPD dan Desa)	Persentase pengelolaan arsip dinamis daerah kabupaten/kota yang terealisasi		100 %		100 %	32,685,000			Persentase tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja	100 %	35,500,000
2	24	02	2.02		Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota								15,000,000					30,000,000
2	24	02	2.02	02	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Persentase tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja	Jumlah berkas (berkas)	Persentase pengelolaan arsip statis daerah kabupaten/kota yang terealisasi		100 %		100 %	15,000,000			Persentase tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja	100 %	30,000,000
2	24	02	2.03		Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota								167,964,453					224,850,000
2	24	02	2.03	02	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja	Jumlah pengelola arsip yang difasilitasi (Pengelola) Jumlah pengelola arsip OPD, Sekolah, dan Desa yang dibina (Pengelola)	Persentase pengelolaan simpul jaringan informasi kearsipan nasional tingkat kabupaten/kota yang terealisasi		100 %		100 %	167,964,453			Persentase tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja	100 %	224,850,000
2	24	03			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP								40,522,006					39,787,006
2	24	03	2.01		Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun								40,522,006					39,787,006
2	24	03	2.01	01	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban	jumlah dokumen arsip yang dinilai dan penetapan pemusnahannya (dokumen)	Persentase arsip usul musnah yang terealisasi		100 %		100 %	5,000,000			tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban	100 %	3,000,000
2	24	03	2.01	02	Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban	Jumlah arsip usul musnah (dokumen)	Persentase arsip usul musnah yang terealisasi		100 %		100 %	35,522,006			tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban	100 %	36,787,006
2	24	04			PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP								22,000,000					25,000,000

2	24	04	2.01		Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota							22,000,000					25,000,000
2	24	04	2.01	01	Penyusunan dan Penetapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban	Jumlah penyusunan dan penetapan SOP yang bersifat tertutup (SOP)	Presentase pelayanan kearsipan bagi OPD, swasta dan masyarakat (Lembaga/Instansi)		25 %		25 %	10,000,000		tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban	25 %	13,000,000
2	24	04	2.01	02	Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban	Jumlah daftar Surat Izin Pengguna Arsip	Presentase pelayanan kearsipan bagi OPD, swasta dan masyarakat (Lembaga/Instansi)	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25 %	20 Surat	25 %	12,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban	25 %	12,000,000
TOTAL												4,530,229,550				5,300,133,652	

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Penyusunan program dan kegiatan berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Luwu Timur menempatkan program dan kegiatan pembangunan bidang perpustakaan dan kearsipan tahun 2020 adalah sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Administrasi Perkantoran :
 - a. Penyediaan jasa surat menyurat
 - b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
 - c. Penyediaan jasa kebersihan kantor
 - d. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
 - e. Penyediaan alat tulis kantor
 - f. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
 - g. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
 - h. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
 - i. Penyediaan makanan dan minuman
 - j. Penyediaan jasa pendukung administrasi/ teknis
 - k. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
 - l. Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Kegiatan SKPD
 - m. Monitoring dan Evaluasi
 - n. Kunjungan kerja dalam daerah
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 - a. Pembangunan gedung kantor
 - b. Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor.
 - c. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
 - d. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
 - a. Bimbingan teknis implementasi peraturan perUndang-undangan

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
 - a. Penyusunan laporan kinerja dan iktisar realisasi kinerja
 - b. Penyusunan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
5. Program perencanaan dan penganggaran skpd
 - a. Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD
6. Program Pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan
 - a. Layanan pustaka dan informasi / layanan sirkulasi
 - b. Apresiasi perpustakaan desa dan sekolah
 - c. Pekan masyarakat membaca
 - d. Penyediaan dan pelestarian bahan pustaka perpustakaan daerah
 - e. Pembinaan pengelolaan perpustakaan
8. Program Peningkatan Sistem Informasi Kearsipan Daerah
 - a. Pengelolaan data base kearsipan
 - b. Penyediaan layanan informasi kearsipan
 - c. Pengembangan dan pengelolaan system informasi kearsipan
9. Program Pembinaan Penyelenggaraan Kearsipan
 - a. Peningkatan kapasitas pengelola arsip daerah
 - b. Pembinaan kearsipan perangkat daerah dan desa
 - c. Pengawasan internal kearsipan

Berikut tabel Rencana Program, Kegiatan/Sub Kegiatan, dan Pendanaan Tahun Anggaran 2022 :

Tabel 4.1

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah							
								T-1	T				T+1		
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer		Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
2	23				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN				3,695,172,117	180,500,000	0	0	3,875,672,117		
2	23	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				3,320,891,034	180,500,000	0	0	3,501,391,034		
2	23	01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				77,094,335	0	0	0	77,094,335		
2	23	01		2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dinas Perpustakaan dan Kearsipan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		34,280,755	0	0	0	34,280,755	
2	23	01		2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dinas Perpustakaan dan Kearsipan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2,374,540	0	0	0	2,374,540	
2	23	01		2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD (Dinas Perpustakaan dan Kearsipan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		5,000,850	0	0	0	5,000,850	
2	23	01		2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dinas Perpustakaan dan Kearsipan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		35,438,190	0	0	0	35,438,190	
2	23	01		2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				2,607,804,993	0	0	0	2,607,804,993	
2	23	01		2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Dinas Perpustakaan dan Kearsipan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2,573,091,023	0	0	0	2,573,091,023	
2	23	01		2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Dinas Perpustakaan dan Kearsipan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		34,713,970	0	0	0	34,713,970	
2	23	01		2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				14,788,711	0	0	0	14,788,711	

2	23	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Dinas Perpustakaan dan Kearsipan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		14,788,711	0	0	0	14,788,711	
2	23	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				65,170,000	0	0	0	65,170,000	
2	23	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya (Dinas Perpustakaan dan Kearsipan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		28,200,000	0	0	0	28,200,000	
2	23	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Dinas Perpustakaan dan Kearsipan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		36,970,000	0	0	0	36,970,000	
2	23	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				199,534,800	0	0	0	199,534,800	
2	23	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Dinas Perpustakaan dan Kearsipan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		7,115,000	0	0	0	7,115,000	
2	23	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Dinas Perpustakaan dan Kearsipan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		9,579,500	0	0	0	9,579,500	
2	23	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (Dinas Perpustakaan dan Kearsipan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		7,000,300	0	0	0	7,000,300	
2	23	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (Dinas Perpustakaan dan Kearsipan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		6,120,000	0	0	0	6,120,000	
2	23	01	2.06	08	Fasilitas Kunjungan Tamu (Dinas Perpustakaan dan Kearsipan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		28,499,000	0	0	0	28,499,000	
2	23	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dinas Perpustakaan dan Kearsipan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		141,221,000	0	0	0	141,221,000	
2	23	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				1,520,000	180,500,000	0	0	182,020,000	
2	23	01	2.07	05	Pengadaan Mebel (Dinas Perpustakaan dan Kearsipan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		0	2,600,000	0	0	2,600,000	
2	23	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Dinas Perpustakaan dan Kearsipan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		760,000	62,800,000	0	0	63,560,000	

2	23	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Dinas Perpustakaan dan Kearsipan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	4,600,000	0	0	4,600,000
2	23	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Dinas Perpustakaan dan Kearsipan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	760,000	110,500,000	0	0	111,260,000
2	23	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			251,718,195	0	0	0	251,718,195
2	23	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Dinas Perpustakaan dan Kearsipan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6,941,575	0	0	0	6,941,575
2	23	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Dinas Perpustakaan dan Kearsipan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	160,776,620	0	0	0	160,776,620
2	23	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Dinas Perpustakaan dan Kearsipan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84,000,000	0	0	0	84,000,000
2	23	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			103,260,000	0	0	0	103,260,000
2	23	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (Dinas Perpustakaan dan Kearsipan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	61,450,000	0	0	0	61,450,000
2	23	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Dinas Perpustakaan dan Kearsipan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20,360,000	0	0	0	20,360,000
2	23	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (Dinas Perpustakaan dan Kearsipan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	21,450,000	0	0	0	21,450,000
2	23	02			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN			374,281,083	0	0	0	374,281,083
2	23	02	2.01		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			220,958,811	0	0	0	220,958,811
2	23	02	2.01	01	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik (Dinas Perpustakaan dan Kearsipan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	9,999,465	0	0	0	9,999,465
2	23	02	2.01	04	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan (Dinas Perpustakaan dan Kearsipan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	16,961,879	0	0	0	16,961,879
2	23	02	2.01	07	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota (Dinas Perpustakaan dan Kearsipan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	143,998,406	0	0	0	143,998,406
2	23	02	2.01	09	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Kab. Luwu Timur, Semua	34,999,975	0	0	0	34,999,975

2	24	03	2.01	01	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun (Dinas Perpustakaan dan Kearsipan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4,999,792	0	0	0	4,999,792
2	24	03	2.01	02	Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun (Dinas Perpustakaan dan Kearsipan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	35,521,953	0	0	0	35,521,953
2	24	04			PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP			21,999,562	0	0	0	21,999,562
2	24	04	2.01		Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota			21,999,562	0	0	0	21,999,562
2	24	04	2.01	01	Penyusunan dan Penetapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup (Dinas Perpustakaan dan Kearsipan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	9,999,716	0	0	0	9,999,716
2	24	04	2.01	02	Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup (Dinas Perpustakaan dan Kearsipan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	11,999,846	0	0	0	11,999,846

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) tahun 2022 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan merupakan pelaksanaan tahun keempat dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026 yang menjadi prioritas pembangunan difokuskan kepada pencapaian target kinerja sebagaimana telah ditetapkan, dengan berpedoman kepada RPJMD dan Renstra dan mengacu pada RKPD Tahun 2022.

Rencana Kerja (Renja) yang telah ditetapkan perlu disosialisasikan agar semua pihak mempunyai satu persepsi tentang rencana kerja yang telah ditetapkan sehingga pelaksanaan kegiatan yang direncanakan dapat tercapai hasilnya secara optimal.

Rencana Kerja (Renja) disusun sebagai dokumen perencanaan tahunan daerah pada Level SKPD dan disusun sebagai penjabaran Renstra SKPD dan memuat rencana kegiatan pembangunan tahun berikutnya yang dikompilasi di tingkat Pemerintah Daerah menjadi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten. RKPD berfungsi sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang berfungsi sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Demikian Rancangan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Luwu Timur tahun 2022 disusun untuk memberi gambaran tentang rencana kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2022.

Keberhasilan program dan kegiatan yang ada pada renja tersebut perlu didukung oleh anggaran, SDM yang profesional dan sarana prasarana yang memadai. Semoga renja yang telah disusun dapat menjadikan pedoman dalam pembangunan khususnya dibidang Perpustakaan dan Kearsipan.

Malili, Juli 2021
KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN
DAN KEARSIPAN,



S A T R I, S E
Pembina Tk. I
NIP. 19641231 199001 1 005